

## Geger Mukhtar NU ke-29 di Cipasung 1994

Nur Fadilah Yusuf

Universitas Gadjah Mada Jl. Bulaksumur, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281,  
fadilahyusuf023@gmail.com

### **Abstract**

*This article discusses the political intervention carried out by President Soeharto and the New Order government against the implementation of the Nahdlatul Ulama (NU) Congress when Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was about to nominate himself as general chairman for the third term in 1994. This article also explains how the chronology of the feud between Gus Dur and the New Order government, so that the implementation of the 29th NU Congress in Cipasung became a national political contestation at stake. This article also discusses the role of President Soeharto and the New Order Government when campaigning ahead of the NU Congress by agitating and propaganda and preparing alternative candidates such as Abu Hasan. This study uses historical methods according to Louis Gottschalk, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. In addition, the political approach is used in this article and the theory of power according to Hobbes is the analytical knife for the author in reconstructing this research. The purpose of the research results from this article is to review the past conflict between Gus Dur and the New Order Government, the political strategy carried out by President Soeharto and the New Order Government in the implementation of the 29th NU Congress in Cipasung and the importance of NU for the New Order Government and President Soeharto. in determining national policy.*

### **Keywords**

*President Soeharto; the New Order Government; Gus Dur; the NU Congress.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang intervensi politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru terhadap pelaksanaan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ketika Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan mencalonkan dirinya sebagai ketua umum untuk periode ketiga tahun 1994. Dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana kronologi dari persetujuan antara Gus Dur dengan Pemerintah Orde Baru, sehingga dalam pelaksanaan Mukhtar NU ke-29 di Cipasung menjadi pertarungan kontestasi perpolitikan nasional. Artikel ini juga membahas mengenai peran Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru saat melakukan kampanye menjelang perhelatan Mukhtar NU dengan melakukan agitasi dan propaganda serta menyiapkan calon alternatif seperti Abu Hasan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Selain itu, pendekatan politik digunakan dalam artikel ini dan teori kekuasaan menurut Hobbes yang menjadi pisau analisis bagi penulis dalam merekonstruksi penelitian ini. Tujuan hasil penelitian dari artikel ini yaitu mengulas mengenai konflik masa silam antara Gus Dur dan Pemerintah Orde Baru, strategi politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Mukhtar NU ke-29 di Cipasung dan pentingnya NU bagi Pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto dalam menentukan kebijakan nasional.

### **Kata kunci**

Presiden Soeharto; Pemerintah Orde Baru; Gus Dur; Muktamar NU.

*\*Received: 2 August 2022*

*\*Accepted: 30 October 2022*

*\*Revised: 23 October 2022*

*\*Published: 31 October 2022*

## **PENDAHULUAN**

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 (Mashad, 2008) dan telah mengalami serangkaian perkembangan zaman, sehingga dalam prosesnya NU telah beberapa kali mengadakan pelaksanaan muktamar. Sepanjang sejarah NU berdiri, pelaksanaan Muktamar NU ke-29 di Cipasung merupakan ajang kontestasi terpanas karena melibatkan pihak eksternal, yaitu Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru. Muktamar NU di Cipasung menjadi arti penting bagi warga NU, karena pada momentum ini, sebenarnya merupakan *proxy war* antara Pemerintah Orde Baru yang mencalonkan Abu Hasan dan Rais Syuriah yang mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kiai Ilyas Ruchiat akhirnya terpilih kembali menjadi Rais 'Aam dalam muktamar tersebut (Yahya, 2006), meskipun Kiai Ilyas Ruchiat menjadi Rais 'Aam, tidak mempengaruhi langkah Pemerintah Orde Baru untuk merebut kursi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pemerintah Orde Baru membuat propaganda kampanye Asal Bukan Gus Dur (ABG) untuk meraup dukungan dari sejumlah suara, khususnya Jawa Timur. Ketika pelaksanaan muktamar dimulai, Presiden Soeharto bersama seluruh jajaran Orde Baru seperti Feisal Tanjung dan Harmoko ikut serta dalam rangkaian kegiatan muktamar (Hefner, 2000). Secara terbuka, Gus Dur dalam sambutannya menyatakan bahwa dirinya merupakan penantang utama Pemerintah Orde Baru. Pernyataan tersebut jelas menuai respon negatif dari seluruh jajaran pemerintah yang hadir di arena muktamar dan mengakibatkan Presiden Soeharto tidak saling berjabat tangan dengan Gus Dur. Situasi forum mulai memanas ketika prosesi pemilihan Ketua Umum PBNU yang menghasilkan Gus Dur dan Abu Hasan sebagai kandidat terkuat. Saat itu, Pemerintah Orde Baru mengerahkan serdadu militer untuk berjaga di lokasi tempat penghitungan suara.

Pengawasan militer yang ketat, membuat para muktamirin merasakan intervensi Pemerintah Orde Baru yang cukup kuat di arena muktamar, sehingga dapat dipastikan Abu Hasan berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Kondisi tersebut, semakin memanas ketika memasuki tahapan penghitungan suara, perolehan suara di muktamar, Abu Hasan sempat mengungguli Gus Dur. Tetapi konsolidasi yang telah dibangun oleh Gus Dur akhirnya membuahkan hasil, hal ini terlihat ketika perolehan suara Gus Dur berhasil mengimbangi Abu Hasan. Pada tanggal 5 Desember 1994, panitia muktamar mengumumkan kemenangan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU Periode 1994–1999.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas mengenai intervensi Pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-29 di Cipasung. Tentu saja, terdapat sebab-akibat mengapa Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi terhadap jalannya muktamar, meskipun akhirnya berujung pada terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa jabatan yang ketiga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi, khususnya terhadap peran tulisan sejarah sebagai transformasi atau penyampaian dari masa lalu ke masa kini dan untuk masa depan, sehingga para pembaca dan warga NU khususnya dapat mengetahui bahwa perhelatan Muktamar NU ke-29 di Cipasung merupakan kegiatan muktamar terpanas dalam sejarah NU dan untuk pertama kalinya presiden dan pemerintah melakukan intervensi terhadap organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan konsep atau pendekatan politik, karena selama ini politik mengkaji tentang kekuasaan dengan berbagai konsepnya yang beragam. Termasuk di dalamnya, politik menaruh perhatian terhadap istilah yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan *power*, seperti otoritas, pengaruh, kekuasaan, dan atau kekerasan. Penulis menggunakan sudut pandang dari Pemerintah Orde Baru. Teori yang digunakan oleh penulis yaitu kekuasaan yang dikemukakan oleh Hobbes. Hobbes mengartikan kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan yang bagus. Oleh karena itu setiap orang akan berusaha memperoleh kekuasaan dengan cara mengejar posisi yang memungkinkan bisa meraih kekuasaan dan menggunakannya (Maliki, 2010).

Artinya dalam hal ini, kekuasaan selalu mempersoalkan karakteristik kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, distribusi, dan konsekuensi dari penggunaan kekuasaan. Teori ini sangat tepat digunakan oleh penulis, mengingat penelitian yang dilakukan memiliki kaitannya dengan kekuasaan untuk melakukan intervensi politik terhadap jalannya muktamar. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain, 1. Bagaimana peran Gus Dur dalam memimpin PBNU? 2. Apa pentingnya NU bagi Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru? 3. Bagaimana sikap ambisius Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung?

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penjelasan mengenai tinjauan pustaka dari beberapa karya tulis agar penelitian ini menjadi orisinal dan terhindar dari konteks plagiarisme. Adapun tinjauan pustaka pertama berjudul NU Kaum Muda Progresif dan Sekularisme Baru yang ditulis oleh Laode Ida (2004). Pada tulisan ini, Laode Ida menjelaskan kaum reformis NU yang memiliki potensi menghidupkan NU kembali sesuai dengan *khittah*-nya dan menjelaskan mengenai kiprah dari Abdurrahman Wahid yang berperan penting dalam pelaksanaan kerja-kerja organisasi yang lebih bersifat sosial dan keagamaan. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PBNU secara aklamasi berdasarkan keputusan muktamir yang menganggap Abdurrahman Wahid dapat mengembalikan NU sesuai pada koridornya di samping Abdurrahman Wahid merupakan darah biru NU.

Karya tulis kedua berjudul Kembali ke Khittah 1926 dan Upaya Penyelesaian Masalah-Masalah Nahdlatul Ulama Pasca Muktamar ke-27 di Situbondo (1984-1999) yang ditulis oleh Muhammad Khaerul Hadi (2018). Karya tulis ini menjelaskan mengenai keputusan Muktamar NU di Situbondo yang diimplementasikan dalam kepengurusan terpilih pada muktamar tersebut, sehingga tulisan ini menekankan mengenai penafsiran dan implementasi tentang khittah Nahdliyyah baik secara individual maupun secara organisasi. Perbedaan dengan karya penulis yaitu terletak pada fokus bahasan muktamar.

Karya tulis ketiga berjudul Artikulasi Politik NU Pasca Khittah 1926, studi analisis tentang dinamika politik NU sejak Muktamar Situbondo 1984 hingga Muktamar Cipasung 1994 yang ditulis Mudhofi (1998). Tulisan ini membahas tentang gambaran perpolitikan NU sejak diputuskan *khittah* pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 sampai Muktamar NU ke-29 di Cipasung tahun 1994, selain itu, dalam tulisan ini juga dibahas mengenai hubungan NU dengan politik praktis dan masalah penyelesaiannya atau rekonsiliasi dengan pihak internal maupun eksternal NU.

### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1985). Pertama, heuristik adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk mencari dokumen dan mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan peristiwa. Langkah ini dilakukan setelah tema tulisan ditetapkan. Sumber yang dikumpulkan meliputi baik sumber primer seperti surat kabar dan foto. Sumber sekunder penulis menggunakan penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, tesis, dan skripsi. Tahap kedua, kritik sumber yaitu dilakukan dengan meneliti atau membandingkan sumber dokumen dan lisan. Kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Tahap ketiga adalah interpretasi, yang sering juga disebut analisis sejarah. Tahap ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara semua fakta yang ditemukan. Tahap keempat adalah penulisan atau historiografi, merupakan cara pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Alur pemaparan data dalam penulisan sejarah harus kronologi (Kuntowijoyo, 2013).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Gus Dur dalam Memimpin PBNU**

Tahun 1984, para muktamirin memilih Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU di Situbondo, Jawa Timur. Bersamaan dengan itu, Kiai Achmad Shiddiq menjabat sebagai Rais 'Aam untuk mendampingi Gus Dur (Siradj, 1999). Seiring berjalannya kepengurusan yang baru, Gus Dur aktif dalam memperkuat silaturahmi sampai ke tingkat ranting, selain aktif melakukan silaturahmi di internal, Gus Dur juga membantu menyuarakan keadilan bagi kelompok minoritas yang terpinggirkan, seperti

pembelaannya terhadap etnis Tionghoa. Langkah besarnya cukup terlihat ketika Gus Dur kerap mengeluarkan pernyataan kontroversi di sebagian kalangan, baik melalui tulisan maupun saat diwawancarai di media massa dan cenderung menentang arus (Ahmad, 2010). Akan tetapi, melalui dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru, Gus Dur sebagai ketua umum organisasi Islam pertama yang mendukung azas tunggal, membuat hubungan NU dengan Pemerintah Orde Baru menjadi harmonis (Ida & Jauhari, 1999).

Kedekatan Gus Dur dengan Pemerintah Orde Baru terbilang singkat, tahun 1985, Gus Dur melakukan kritik terhadap pemerintah karena kebijakan represifnya yang tidak berpihak kepada masyarakat di Kedungombo untuk pembangunan waduk yang didanai oleh World Bank dan terkait dengan beberapa kebijakan Pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan pemikirannya (Barton, 2017). Sebagai akibat dari pernyataan Gus Dur, Pemerintah Orde Baru akhirnya mulai mengambil sikap untuk memanggil Gus Dur dan menuntutnya meminta maaf di Istana Merdeka, tetapi Gus Dur menolak permintaan tersebut, karena sikapnya yang menjadi oposisi Orde Baru, secara tidak langsung, Gus Dur membuat internal PBNU mulai khawatir ketika bertemu dengan pejabat Orde Baru yang didominasi oleh militer.

Pada tahun 1990-an, sikap Gus Dur semakin berseberangan dengan pemerintah. Untuk merangkul sejumlah kalangan cendekiawan uslim, Presiden Soeharto membentuk organisasi bernama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh BJ. Habibie (Husaini, 1996). Presiden Soeharto meminta kepada BJ. Habibie untuk mengajak Gus Dur bergabung di ICMI, tetapi Gus Dur menolak permintaan tersebut (Makka & Mashad, 1996). Justru sebaliknya, Gus Dur menilai bahwa pembentukan ICMI hanya akan menjadi menimbulkan konflik sektarian di masyarakat Indonesia, sehingga untuk mengimbangi ICMI yang didominasi oleh cendekiawan muslim, Gus Dur membentuk Forum Demokrasi (Fordem) yang di dalamnya terdapat Bondan, Marsilam Simanjuntak, Rahman Tolleng, Rocky Gerung, dan aktivis lainnya (Feillard, 1999). Konflik antara Pemerintah Orde Baru dengan PBNU semakin tampak ke permukaan, seperti pada tahun 1992, ketika Gus Dur mengadakan Rapat Akbar di Jakarta, melihat potensi akan hadirnya jutaan warga NU, Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan untuk melakukan penghadangan guna menggagalkan berkumpulnya warga NU di Jakarta, terutama mereka yang datang dari Jawa Timur (Barton, 2017).

### **Pentingnya NU Bagi Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru**

Kontribusi NU dalam konteks wawasan kebangsaan semakin memiliki arti, sehingga langkah Gus Dur dalam melakukan penghidupan demokrasi di Indonesia merupakan langkah konkret yang diperhitungkan oleh kalangan aktivis. Ketika Gus Dur membentuk Fordem untuk menandingi ICMI, sebenarnya Pemerintah Orde Baru sudah mulai berpikir untuk menghimpun kekuatan dari ICMI, tetapi hal itu dirasa kurang untuk mengimbangi manuver Gus Dur, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

penggagalan terhadap kegiatan NU dan Fordem. Untuk menggagalkan Rapat Akbar NU di Jakarta, Pemerintah Orde Baru mempersulit penerbitan izin kegiatan yang baru disetujui satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Senayan, Jakarta akhirnya menjadi tidak karuan, sebagai bentuk perlawanan dari pemerintah terhadap sikap Gus Dur yang selalu berseberangan dengan berbagai kebijakan yang ada, akhirnya memberi dampak kepada NU itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Orde Baru juga menyiapkan polisi-polisi di perbatasan Jakarta dengan daerah lainnya dengan maksud untuk menghadang bus yang mengangkut warga NU untuk masuk ke Jakarta (Isre, 1998).

Penghadangan ini terbilang sukses, karena PBNU memprediksi bahwa akan ada sekitar dua juta warga NU yang akan masuk ke Jakarta untuk menghadiri Rapat Akbar tersebut, akan tetapi realitanya adalah hanya sekitar dua ratus ribu yang hadir dalam kegiatan tersebut. NU menjadi penting bagi Orde Baru dan Presiden Soeharto, mengingat penggalangan massa tersebut dapat berujung pada bentuk dukungan terhadap Gus Dur yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Bentuk pelarangan tersebut tidak hanya untuk kegiatan NU melainkan acara Fordem juga tidak mendapatkan tempat, sebab dikhawatirkan Fordem dan NU akan menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan dalam bentuk kritik terhadap pemerintah (Isre, 1998).

Pemerintah Orde Baru dinilai sukses melakukan pelemahan kepemimpinan Gus Dur dari luar dengan cara menggagalkan upaya untuk berkumpulnya NU di Jakarta. Manuver politik yang dilakukan Presiden Soeharto terhadap NU akhirnya mendapat respons keras dari Gus Dur, Presiden Soeharto mendapati surat yang dikirim dari Gus Dur dengan memberikan nada peringatan terkait sikap represif Pemerintah Orde Baru dengan menyebar polisi untuk menghadang warga NU yang datang ke Jakarta dengan membandingkan kondisi yang terjadi di Aljazair dan beberapa negara Timur-Tengah lainnya (Kompas, 2 Maret 1992). Akhirnya Presiden Soeharto membalas surat Gus Dur yang disampaikan oleh Prabowo Subianto yang berisikan tidak perlu ikut campur dalam urusan politik, bila ia ingin terlibat dalam politik, maka Gus Dur harus menyetujui terpilihnya Soeharto sebagai presiden dalam suksesi kepemimpinan nasional mendatang dan memilih antara PBNU atau Fordem (Barton, 2017).

Memasuki tahun 1994, masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU akan berakhir, Presiden Soeharto menilai bahwa bila Gus Dur tidak lagi menjabat, maka tidak akan ada lagi suara-suara yang dianggap sebagai barisan oposisi dan pernyataan sikap Gus Dur untuk tidak lagi mencalonkan sebagai Ketua Umum PBNU (Barton, 2017). Selain itu, Presiden Soeharto juga menekankan bahwa pemerintah harus menjadi kontrol bagi masyarakat dan tugas sebagai wakil rakyat harus tegas, meskipun ada yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mulai melemah karena dominasi dari Pemerintah Orde Baru. Bagi Pemerintah Orde Baru, NU dan Gus Dur merupakan oposisi yang dapat membahayakan kekuatan politiknya. Oleh karena itu, pemerintah harus

melakukan intervensi pada pelaksanaan muktamar mendatang dengan mencari calon alternatif yaitu Abu Hasan (Hefner, 2000).

Pada tahun yang sama, media cetak seperti Tempo, Detik, dan Editor dibredel oleh Departemen Penerangan karena tidak terima atas kebijakan Presiden Soeharto yang membeli kapal selam milik Jerman Timur. Saat Pemerintah Orde Baru berhasil menekan kekuatan media, justru Gus Dur kembali mengkritiknya, sehingga membuat pemerintah menjadi jengkel atas sikap dari Gus Dur (Feillard, 1999). Kondisi ini semakin membulatkan tekad pemerintah untuk ikut andil dalam pelaksanaan muktamar. Sebelum melaksanakan muktamar, para Rais Syuriah berkumpul dan memutuskan agar Gus Dur kembali mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU dan dua pekan setelah itu, Gus Dur menyatakan sikap bahwa dirinya akan mencalonkan kembali (Isre, 1998).

### **Sikap Ambisius Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung**

Mendengar pernyataan Gus Dur akan maju kembali sebagai ketua umum awalnya tidak terlalu dihiraukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan kepemimpinan Gus Dur yang sudah terlalu lama dan cenderung berlawanan dengan pemerintah serta pernyataan-pernyataannya yang kerap kali menuai kontroversi, sehingga dapat dipastikan Gus Dur tidak akan terpilih kembali dalam muktamar mendatang. Oleh karena itu, strategi untuk memenangkan calon alternatif yang akan menggantikan Gus Dur haruslah orang yang lahir dari kalangan NU, tetapi memiliki pengaruh yang hamper sama dengan Gus Dur. Dinamika perubahan tersebut merupakan sebuah perkembangan yang terjadi atas suatu desakan atau kondisi zaman yang kemudian mempengaruhi kondisi seseorang atau masyarakat (Suhandjati, 2012). Untuk memuluskan langkah intervensinya, Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah politisnya seperti.

#### **1. Kampanye Asal Bukan Gus Dur (ABG)**

Kampanye merupakan salah satu langkah atau proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan dengan terstruktur dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek tertentu pada sejumlah khalayak masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Langkah politis ini juga tepat dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk mencari dukungan dari kelompok-kelompok sosial dan politik untuk mencapai tujuannya, sehingga dengan membuat satu agitasi dan propaganda mengenai kampanye Asal Bukan Gus Dur dinilai cukup tepat dalam meraup dukungan suara dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang di NU, Pemerintah Orde Baru juga menyiapkan calon alternatif seperti Chalid Mawardi (Forum Keadilan, 1994). Meskipun kampanye tersebut dilakukan, nampaknya Pemerintah Orde Baru belum berhasil mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran pengurus NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

## **2. Pendekatan Terhadap Tokoh NU**

Dalam memuluskan langkahnya, Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru juga menjalin dukungan terhadap beberapa tokoh NU seperti Kiai Yusuf Hasyim agar dapat menjadi suksesor dalam pemenangan Abu Hasan. Langkah politis selanjutnya adalah pendekatan terhadap Kiai Yusuf Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Hasyim Asy'ari dan juga paman Gus Dur. Kiai Yusuf Hasyim dinilai sebagai orang yang juga bersikap oposisi terhadap kepemimpinan Gus Dur di PBNU, meskipun Kiai Hasyim berada dalam jajaran Rais Syuriah, tetapi sikap Gus Dur yang kerap berseberangan dengan Pemerintah Orde Baru dan penolakannya untuk bergabung dengan ICMI, sehingga menyebabkan hubungan antara paman dan keponakan ini menjadi retak. Inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, terlebih Kiai Yusuf Hasyim merupakan mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang masih memiliki pengaruh di beberapa tokoh NU lainnya dan juga menjadi pengasuh dari Pondok Pesantren Tebuireng sejak tahun 1965 (Halwan, 2008), sehingga langkah inilah yang diperhitungkan oleh Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru untuk menggagalkan pemenangan Gus Dur.

## **3. Penerjunan Militer ke Lokasi Muktamar NU di Pondok Pesantren Cipasung**

Pada tanggal 1 Desember 1994, PBNU menggelar muktamarnya yang ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, tetapi kegiatan Muktamar NU ke-29 baru dibuka secara resmi pada tanggal 2 Desember 1994. Muktamar NU kali ini digelar di kediaman Rais 'Aam PBNU Kiai Ilyas Ruchiat. Pada kesempatan ini, kepanitian Muktamar NU ke-29 mengangkat tema yaitu "Mengembangkan Prakarsa dan Ikhtiar Kolektif sesuai Tuntunan Khittah NU, untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan", tema ini dipilih dengan maksud bahwa warga NU benar-benar menjalankan NU secara organisatoris yang jauh dari kepentingan politik praktis, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para muktamirin pada saat pelaksanaan Muktamar NU ke-27 di Situbondo.

Presiden Soeharto dan jajaran Pemerintah Orde Baru seperti Feisal Tandjung, Hartono, Prabowo Subianto, Siti Rukmana, dan ketua umum Golkar yaitu Harmoko, turut hadir dalam pembukaan Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung. Akan tetapi, kedatangan jajaran Pemerintah Orde Baru bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap Abu Hasan dalam muktamar (Hefner, 2000). Sesampainya di lokasi muktamar, Presiden Soeharto dan jajaran Pemerintah Orde Baru disambut oleh Kiai Ilyas Ruchiat untuk diantar sampai ke kursi khusus presiden dan jajaran pemerintah yang hadir, sedangkan Gus Dur duduk bersama Megawati Soekarnoputri ketua umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di kursi paling belakang (Islahuddin, 2010).



**Gambar 1. Gus Dur datang dengan pengawal Banser**

Sumber: Kompas, 2 Desember 1994

Pada tanggal 2 Desember 1994, Kiai Munasir Ali bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan muktamar tersebut. Kiai Munasir Ali membuka acara dengan bernada kritik yang ditujukan kepada Presiden Soeharto karena masa jabatannya yang terlalu lama sebagai pemimpin negeri (Hidayat & Sunarlan, 2020). Meskipun mendapat sindiran dari ketua panitia, Presiden Soeharto tidak menghiraukannya, Presiden Soeharto dan jajaran pemerintah tetap berfokus pada perebutan kursi ketua umum. Prosesi kegiatan muktamar terus berlangsung, Kiai Ilyas Ruchiat akhirnya terpilih menjadi Rais 'Aam PBNU periode 1994–1999 (Kompas, 5 Desember 1994), sidang pleno terus berlanjut sampai akhirnya tiba saat pemilihan bakal calon Ketua Umum PBNU. Memasuki penjurangan bakal calon ketua umum, Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru mengerahkan serdadu militer. Setelah mekanisme bakal calon ketua umum selesai, muncul beberapa nama seperti, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Abu Hasan, Fahmi Saifuddin, dan Chalid Mawardi.

**Tabel 1. Perolehan Suara Bakal Calon Ketua Umum PBNU 1994–1999**

Nomor	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1.	Abdurrahman Wahid	157
2.	Abu Hasan	136
3.	Fahmi Saifuddin	17
4.	Chalid Mawardi	6

Sumber: Kompas 5 Desember 1994

Sesuai data yang terhimpun dalam perolehan bakal calon Ketua Umum PBNU, Gus Dur dan Abu Hasan akhirnya menjadi kandidat terkuat dalam putaran kedua. Mengingat kuatnya dukungan Gus Dur dari jajaran NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pemerintah Orde Baru kembali mengerahkan 1.500 personel untuk

berjaga di lokasi pemungutan suara. Perolehan suara yang diraih oleh Abu Hasan dan Gus Dur saat mekanisme pemilihan bakal calon ketua umum, mengantarkan kedua kandidat tersebut untuk maju ke tahap pemilihan calon ketua umum. Perolehan suara yang diraih oleh Fahmi Saifuddin dan Chalid Mawardi bisa saja masuk ke dalam dukungan Abu Hasan atau Gus Dur. Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru harus menggalang dukungan dari suara pemilih Fahmi Saifuddin dan Chalid Mawardi untuk berkubu pada Abu Hasan.

Apabila Pemerintah Orde Baru mendapat dukungan berhasil didapat dari pemilih Fahmi Saifuddin dan Abu Hasan, suara yang diperoleh oleh Abu Hasan bertambah 23 suara, maka dapat dipastikan Abu Hasan akan memenangi pertarungan pada Muktamar NU ke-29. Saat, sidang pleno diskors untuk beberapa jam, pemerintah kembali melakukan konsolidasi dukungan terhadap Abu Hasan, meskipun tidak mendapat simpatik dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, pemerintah mendapat dukungan besar dari pengurus di luar Jawa, sehingga dukungan yang diberikan oleh para pengurus NU yang datang dari Sumatera dan Kalimantan Selatan dapat mengimbangi konsolidasi dukungan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah (Ida, 2004).

Sidang pleno pemilihan ketua umum PBNU Kembali dimulai. Berselang dua jam, panitia muktamar mengumumkan untuk melakukan penghitungan suara pada putaran kedua. Pada awal penghitungan suara, Gus Dur dan Abu Hasan kerap saling bersaing menjadi yang teratas, tetapi Abu Hasan akhirnya dapat mengungguli perolehan suara Gus Dur yang sempat tertinggal jauh (Kompas, 6 Desember 1994). Abu Hasan berusaha untuk tetap tenang, mengingat ia berhasil mendapat dukungan dari Chalid Mawardi dan Fahmi Saifuddin sehingga sangat tidak mungkin bagi Gus Dur untuk menjadi pemenang dalam kontestasi muktamar kali ini, terlebih Kiai Yusuf Hasyim yang ikut dalam kelompok Abu Hasan. Kondisi forum mulai memanas, tatkala Gus Dur tertinggal jauh dari Abu Hasan, hal ini dikarenakan adanya dukungan kuat dari Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru serta personel militer yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya muktamar.

Kondisi muktamar akhirnya mulai mereda ketika perolehan suara Gus Dur kembali muncul dan menyusul Abu Hasan. Tempat penghitungan suara kembali ramai pasca Gus Dur mengimbangi perolehan suara Abu Hasan. Tentu saja, Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru merasa heran, terlebih ketika Gus Dur berhasil melampaui suara Abu Hasan, sehingga membuat pesimis bagi para pendukung Abu Hasan dan kubu Pemerintah Orde Baru, sampai akhirnya panitia muktamar mengumumkan kemenangan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU Periode 1994-1999 dengan perolehan suara yaitu:

**Tabel 2. Perolehan Suara Calon Ketua Umum PBNU 1994-1999**

Nomor	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1.	Abdurrahman Wahid	157
2.	Abu Hasan	136

Sumber: Kompas, 6 Desember 1994

Kemenangan Gus Dur langsung tersiar di lokasi penghitungan suara, para muktamirin tidak menyangka bahwa Gus Dur akan menjadi Ketua Umum PBNU untuk periode 1994–1999. Pasca kemenangan Gus Dur, para muktamirin meneriakkan yel-yel Soeharto, *has to go!* (Kompas, 6 Desember 1994) mengingat Presiden Soeharto dan Pemerintah Orde Baru gagal dalam melakukan suksesinya di Mukhtar NU ke-29 untuk memenangkan Abu Hasan. Kemenangan Gus Dur ini terlihat dari konsolidasi yang telah dibangun olehnya sejak awal kepemimpinan di PBNU tahun 1984, meski kerap menuai kontroversi, Gus Dur tidak memperdulikan kritikan yang tertuju pada dirinya. Selain itu, kemenangan Gus Dur membuat Presiden Soeharto beserta Pemerintah Orde Baru yang hadir dalam muktamar tersebut tidak mau mengakui kepemimpinan Gus Dur dan Kiai Ilyas Ruchiat di PBNU sejak terpilihnya pada Mukhtar NU ke-29 di Cipasung.

### KESIMPULAN

Muktamar merupakan sebuah kegiatan pertemuan besar yang digunakan dalam istilah umat Islam untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan dari berbagai problematika yang harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat. Dalam sejarah NU, pelaksanaan muktamar menjadi lima tahun sekali sejak zaman Kiai Idham Chalid dengan maksud untuk mengikuti suksesi kepemimpinan nasional. Akan tetapi, hubungan NU dan pemerintah mulai mengalami disharmonisasi sejak Gus Dur aktif mengkritisi kebijakan Pemerintah Orde Baru sampai berani mengambil sikap oposisi secara terang-terangan. Langkah Gus Dur dinilai cukup membahayakan PBNU oleh sejumlah pihak. Atas sikapnya itulah, Pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto mengambil tindakan serius dengan melakukan intervensi politik dalam kegiatan Mukhtar NU ke-29. Intervensi tersebut diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal yaitu menggeser Gus Dur dari kursi ketua umum. Akan tetapi, Pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto mengalami kegagalan, meski pada awal pertarungan Abu Hasan sempat mengungguli Gus Dur dalam putaran kedua.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. (2010). *Ijtihad politik Gus Dur: Analisis wacana kritis*. LKiS.  
Barton, G. (2017). *Biografi Gus Dur*. Diva Press.  
Feillard, A. (1999). *Nu vis-a vis Negara*. LKiS.

- Forum Keadilan*. (1994, Desember 2). *Kalau Melihat NU dari Saya Itu Salah Baca*.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah: Pengantar metode sejarah*. UI-Press.
- Hadi, M. K. (2018). *Kembali ke Khittah 1926 dan upaya penyelesaian masalah-masalah Nahdlatul Ulama Pasca Muktamar ke-27 di Situbondo (1984-1999)*. UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31775/>.
- Halwan, M. (2008). *Sang pejuang sejati: KH. M. Yusuf Hasyim di Mata Sahabat dan Santri*. Pustaka IKAPETE.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Islam dan demokratisasi di Indonesia*. Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Hidayat, F., & Sunarlan, S. (2020). Dari militer ke panggung politik: Biografi KH. Muhammad Munasir Ali tahun 1958-1998. *Historia*, 2(2), 235–246.
- Husaini, A. (1996). *Habibie, Soeharto dan Islam*. Gema Insani Press.
- Ida, L. (2004). *NU Muda: Kaum progresif dan sekulerisme baru*. Erlangga.
- Ida, L., & Jauhari, A. T. (1999). *Gus Dur di antara keberhasilan dan kenestapaan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Islahuddin, I. (2010). *Gus Dur menertawakan NU*. Pustaka Alvabet.
- Isre, M. S. (1998). *Tabayyun Gus Dur: Pribumisasi Islam hak minoritas reformasi kultural*. LKiS.
- Kompas*. (1992, Maret 1). *Ikrar Warga NU Bukan Kebulatan Tekad*.
- Kompas*. (1992, Maret 2). *Sebagai Bagian Bangsa, NU Tidak Boleh Dikecilkan atau Dipencilkan*.
- Kompas*. (1994, Desember 1). *NU Butuh Pimpinan yang Berprogram Konkret*.
- Kompas*. (1994, Desember 3). *Jangan Merusak Tradisi Demokrasi di NU*.
- Kompas*. (1994, Desember 5). *Secara Aklamasi KH. Ilyas Ruhiat Terpilih Jadi Rais 'Aam Syuriah NU*.
- Kompas*. (1994, Desember 6). *Gus Dur Terpilih Menjadi Ketua Tanfidziyah*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Makka, A. M., & Mashad, D. (1996). *ICMI: Dinamika politik Islam di Indonesia*. Pustaka Cidesindo.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Gadjah Mada University Press.
- Mashad, D. (2008). *Akar konflik politik Islam di Indonesia*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mudhofi, M. (1998). *Artikulasi politik NU Pasca Khittah 1926: Studi analisis tentang dinamika politik NU sejak Muktamar Situbondo 1984 hingga Muktamar Cipasung 1994*. Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siradj, S. A. (1999). *Islam kebangsaan: Fiqih demokratik kaum santri*. Pustaka Ciganjur.

Suhandjati, S. (2012). *Islam dan kebudayaan Jawa revitalisasi kearifan lokal*. Karya Abadi Jaya.

Yahya, L. D. (2006). *Ajengan Cipasung: Biografi K.H. Moh. Ilyas Ruhiat*. Pustaka Pesantren.